

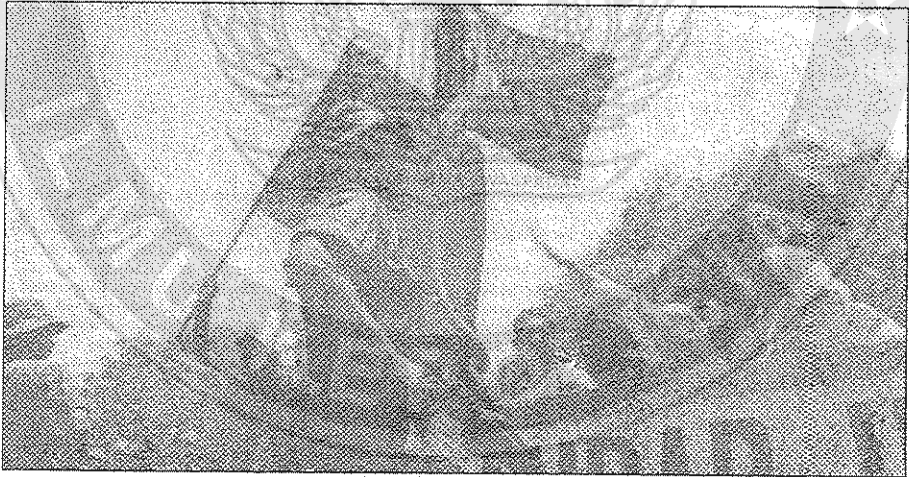
Antisipasii Polri Terhadap Perkembangan Situasi Politik Dan Kamtibmas Di Timor Timur

Oleh : Brigjen Pol. Drs. FX. Soemardi MA, SH.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan derasnya arus reformasi di Indonesia dampaknya membias terhadap kebijaksanaan politik luar negeri, khususnya penangan masalah kepermerintahan di Timor Timur, terutama setelah pertemuan tripartit tanggal 4 dan 5 Agustus 1998 di New

York Amerika Serikat yang pada intinya memberikan status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya bagi Timor Timur. Akibat dari perkembangan status tersebut kebijaksanaan pemerintah di bidang Hankam mengalami perubahan terutama menyangkut masalah perlakuan Daerah Operasi Militer (DOM),



pengurangan jumlah personil tentara (TNI-AD), dilain pihak adanya indikasi menurunnya citra ABRI (Cq. TNI-AD, terutama Kopassus) dan dampak ikutannya perlu diantisipasi oleh Polri bagi kepentingan pembinaan Kamtibmas di Timor Timur.

FAKTA-FAKTA

Pertemuan Tripartit di New York Amerika Serikat yang diselenggarakan tanggal 4 - 5 Agustus 1998 telah mencapai kesepakatan :

Pemberian status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya bagi Timor Timur.

Melibatkan rakyat Timor Timur dalam mencari penyelesaian bagi masalah Timor Timur.

Pengurangan secara bertahap jumlah pasukan ABRI dari Timor Timur.

Pembukaan interest section di ibukota negara masing-masing.

Melanjutkan pertemuan AKETD.

Penetapan waktu pembicaraan pejabat tinggi senior atau senior official meeting (SOM).

Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang bertikai yaitu kelompok GRPRTT dipimpin oleh Manuel Carascalao, Dewan Solidaritas Mahasiswa, kelompok aliran keras Fretilin dan GPK serta kelompok Clandestine yang sampai saat ini menuntut *Referendum* atau *merdeka sendiri* dan mereka menolak *Otonomi khusus* yang disepakati oleh Tripartit.

Pernyataan sikap tokoh Gereja Katolik Timor Timur, Uskup Bello yang masih menjadi panutan warga masyarakat Timor Timur menyatakan bahwa aspirasinya (berkaitan dengan Referendum, Otonomi khusus dan Integrasi) adalah tergantung pada aspirasi rakyat Timor Timur, pernyataan tersebut cenderung memberi angin bagi kelompok yang menolak otonomi khusus dan terus memperjuangkan referendum atau merdeka sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Timor Timur, terdapat kelompok pemuda militan pro integrasi yang berjumlah 1.945 orang yang selama ini dibawah pembinaan Kopassus dan Satuan Tugas Intelejen (SGI) dengan beberapa keterangan :

Sudah terlatih melaksanakan tugas bartuan tempur dan intelejen.

Sebagian dipersenjatai.

Mendapatkan honor tetap setiap bulan.

Pelaksanaan tugas sesuai pembagian wilayah namun dalam pelaksanaan tugasnya sering "*over acting*" sehingga menimbulkan antipati dan tidak disenangi masyarakat.

Terorganisir dalam beberapa kelompok :

Tim Garda Paksi :

- Jumlah = 745 orang.

- Dipersenjatai = 10 orang.

Tim Makikit :

- Jumlah = 182 orang

- Sebagian dipersenjatai (Mouser, SKS, G-3).

Tim Sera :

- Jumlah = 233 orang

- Sebagian mantan GPK.

- Dipersenjatai (M-16, EKE, G-3, Mouser).

Tim Alfa :

- Jumlah = 118 orang

- Sebagian dipersenjatai (M-16,SKS, G-3).

Tim halilintar .

- Jumlah = 288 orang

- Sebagian dipersenjatai (EKE, G-3, Garand, SP dan Mouser).

Tim Saka :

- Jumlah = 379 orang

- Sebagian dipersenjatai (SKS, G-3, SP dan Mouser)

Selain dari 6 tim tersebut diperkirakan masih terdapat kurang lebih 1.000 orang lagi yang belum terdaftar.

Pengurangan pasukan ABRI (khususnya TNI-AD) :

Gelombang I tanggal 28 Juni 1998	= 378 personil
Gelombang II tanggal 5 Agustus 1998	= 373 personil
Gelombang III tanggal 8 Agustus 1998	= 792 personil
Jumlah	= 1.543 personil

Yang akan berlanjut sampai tercapai kekuatan yang ditentukan pimpinan ABRI, walaupun masih ada reaksi sinis dari kelompok anti-integrasi yang tetap tidak yakin bahwa ABRI benar-benar dikurangi.

Pelaksanaan 6 kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tripartit menghadapi berbagai kendala bagi pemerintah Republik Indonesia antara lain pelaksanaan kesepakatan tentang pemberian status khusus berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya masih mendapat tantangan dari kelompok-kelompok ekstrim di Timor Timur yang merdeka sendiri.

Selama pelaksanaan Operasi Militer di Timor Timur ternyata Kopassus melalui Satuan Tugas Intelijen (SGI) telah membentuk Gardagarda yang jumlahnya kurang lebih 1.945 orang di bagi dalam 6 tim, sudah terlatih melakukan operasi tempur dan intelijen, sebagian anggotanya dipersenjatai, melaksanakan tugas sesuai pembagian wilayah yang ditentukan dan masing-masing anggota diberikan honor setiap bulan, namun dalam kegiatannya sehari-hari tindakan-tindakan dari para garda ini terkesan "over acting" sehingga kurang disenangi oleh masyarakat bahkan tokoh gereja katolik Uskup Bello pernah mengusulkan agar Garda ini dibubarkan, namun sampai sekarang keberadaan Garda ini masih tetap dalam pembinaan Kopassus.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Timor Timur, terdapat kelompok

pemuda militan pro integrasi yang berjumlah 1.945 orang yang selama ini dibawah pembinaan Kopassus dan Satuan Tugas Intelejen (SGI).

DISKUSI

Propinsi Timor Timur yang merupakan propinsi ke 27 di Indonesia sejak menyatakan berintegrasi dengan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 ternyata masih "menyimpan" berbagai masalah antara lain :

Sejak berintegrasi dengan Indonesia, Portugal masih terus mempersoalkannya dan melalui tokoh Ramos Horta, status propinsi Timor Timur dijadikan "bulan-bulanan" dari wahana di tingkat internasional bagi kepentingan berbagai fihak, baik perorangan maupun kelompok bahkan negara, sehingga di PBB masalah tersebut masih menjadi agenda pembicaraan, terlebih setelah peristiwa Santa Cruz yang kelabu citra Indonesia mengenai Timor Timur semakin suram.

Ditinjau dari aspek Hankam propinsi Timor Timur masih diperlakukan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan beberapa kekhasannya (semula ada Kogasgab diganti menjadi Kodahankam, berubah menja di Koops dan sekarang di tingkat Koter hanya ada Korem

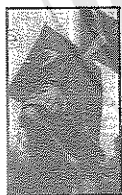
yang organisasinya agak berbeda dengan Korem lain, karena ada Wadanrem), ternyata selama kurun waktu kurang lebih 22 tahun (1976-1998) belum berhasil menumpas GPK/Fretilin dan Klandestinya. (ada komentar sinis dari berbagai kalangan, terutama di lingkungan ABRI khususnya Polri bahwa GPK tersebut sengaja "*dipelihara*" agar dapat menyerap anggaran operasi militer sehingga peran TNI-AD tetap eksis).

Ditinjau dari aspek historis, sosiologis dan politis berintegrasinya Timor Portugis (kemudian menjadi Timor Timur) ke dalam wadah negara Republik Indonesia mempunyai beberapa "*catatan*" yang kurang menguntungkan antara lain :

Di jaman Hindia Belanda, Timor Portugis tidak termasuk wilayah Hindia Belanda.

Saat masuknya/berintegrasinya Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia tidak melalui lembaga dunia sebagaimana Irian Barat melalui UNTEA dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat).

Diawal/menjelang berintegrasinya Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia (per-



Sejak berintegrasi dengan Indonesia, Portugal masih terus mempersoalkannya dan melalui tokoh Ramos Horta, status propinsi Timor Timur dijadikan "bulan-bulanan" dan wahana di tingkat internasional bagi kepentingan berbagai pihak.

tengahan tahun 1976) terdapat beberapa wartawan asing yang mati terbunuh oleh "*para sukarelawan*" (oleh mass media Australia dikatakan dilakukan oleh pasukan ABRI).

Hingga saat ini (sampai dengan pertemuan dan kesepakatan Tripartit, 4 - 5 Agustus 1998 di New York) permasalahan yang ada di Timor Timur semakin kompleks antara lain :

Status otonomi yang seluas-luasnya berdampak luas dibidang politik, sosial ekonomi dan hankam (khususnya organisasi dan binpers/sunda Polri).

Pengurangan personil ABRI (khususnya TNI-AD) dan berubahnya status Daerah Operasi Militer (DOM) dikaitkan dengan tercorengnya citra ABRI (baca Kopassus) akibat kasus penculikan aktivis pro demokrasi, padahal di Timor Timur terdapat cukup banyak (kurang lebih 1.945 orang) anggota Garda terutama Garda paksi yang banyak berlaku "*over acting*" dan justru merupakan "*trouble maker*" dibidang kamtibmas.

Dilain pihak Polri (khususnya Polda Timor Timur) sangat membutuhkan tenaga Polri yang "*mengerti dan betah bertugas di Timor Timur*", padahal anggota-anggota Garda tersebut relatif mempunyai kemampuan dibidang binter dan intelijen (karena dilatih oleh Kopassus).

Polda Timor Timur, sebagai Polda yang relatif baru (semula Polwil, menjadi Polda pada akhir tahun 1997) mempunyai banyak keterbatasan dibanding Polda lain yang telah terbentuk lebih dulu, terutama keterbatasan dibidang sumber daya, khususnya personil dan logistik. Keterbatasan tersebut bilamana dihadapkan kepada hakekat ancaman yang ada dan yang mungkin terjadi dapat menimbulkan tidak tertanganinya permasalahan yang berdampak Kamtibmas secara proporsional dan mernadai,

apalagi Polri harus berada di depan dan tuntutan reformasi yang menuntut penanganan masalah hukum dan HAM secara benar.

Kebijaksanaan Polri di depan yang harus dilaksanakan oleh Polda Timor Timur didapatkan dengan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas menuntut pemikiran dan kebijaksanaan yang "sepadan" dan "memadai" (catatan: hampir serupa terhadap masalah di Timor Timur adalah Aceh dan Irian Jaya) dapat dikatakan "perlu mendapat prioritas" terutama masalah sumber daya (manusia dan logistik).

Dapat dikatakan situasi di Timor Timur menjadi "sorotan mata dunia" dan menjadi "barometer" untuk mengukur sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia menangani masalah Timor Timur (dan ini juga menyangkut nama baik Indonesia) yang seja dini, pada saat ini sudah harus menjadi konsep pemikiran guna meningkatkan kualitas Polda Timor Timur.

Kekuatan ABRI (khususnya militer/tentara) yang ada saat ini:

Militer organik = 9.322 orang.

Militer penugasan = 7.932 orang.

Jumlah = 17.254 orang.

Pada gilirannya perannya harus diisi atau digantikan oleh Polri secara seimbang. Akibat dari pengurangan pasukan ABRI/militer tersebut, perlu antisipasi Polri yaitu:

Menggantikan posisi pasukan ABRI terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan secara selektif prioritas seperti penempatan Brimob pada pos-pos tertentu, pengamanan rute perjalanan umum (RPU) dan pengamanan obyek-obyek vital milik pemerintah.

Penanganan Garda-garda yang ditinggalkan oleh Kopassus yang sudah barang tentu akan menjadi beban dalam pembinaan Kam-

tibmas, untuk itu pembinaan terhadap garda-garda ini dapat berupa:

- Diserahkan kepada aparat teritorial (Korem/Kodim).

- Sebagian yang memenuhi syarat direkrut menjadi satpam, wiraswasta dan petani setelah melalui pelatihan.

- Penambahan personil dan alut/alsus Polda Timor Timur:

- Jangka pendek:

- Penambahan 2 SSK Brimob untuk ditempatkan di sektor Timur.

- Mencukupi sarana perlengkapan yang dibutuhkan.

- Jangka Panjang:

- Dalam rangka menghadapi otonomi khusus Timor Timur khusus untuk pengadaan personil Diktuk BA/TA agar diberikan prioritas kepada putra asli dari Timor Timur.

Dalam rangka "memberikan perhatian" dan kebijaksanaan yang "sepadan" dan memadai terutama untuk memberi motivasi dan dalam rangka pembinaan personil yang mengawaki Polda Timor Timur, maka selain memberikan prioritas penerimaan putra/putri asli daerah (persyaratannya agak diperlunak), tentunya personil lain yang bukan putra daerah juga "diberi perhatian" (selama ini telah dilaksanakan terutama para Kapolres yang masuk Sespim Polri ataupun lulusan Sespim Polri yang dijadikan Kapolres, diharapkan konsisten dan termasuk juga personil/staf lainnya, sejauh yang bersangkutan bekerja baik).

ESENSI HASIL BAHASAN

Bahwa permasalahan di Timor Timur sejak berintegrasi dengan Republik Indonesia (tahun 1976) sampai dengan saat ini terus berkembang dan cenderung tidak menguntungkan bagi

pembinaan Kamtibmas :

Setelah kesepakatan tripartit tanggal 4 - 5 Agustus 1998 di New York, ternyata masih ada kelompok-kelompok anti integrasi yang menolak otonomi khusus yang seluas-luasnya tetapi menginginkan diadakan referendum atau merdeka sendiri, dan hal ini "diberi angin" oleh tokoh panutan Uskup Bello.

Perlakuan ABRI terhadap Timor Timur sebagai DOM selama kurang lebih 22 tahun ternyata meninggalkan "luka-luka yang membebas" dan sulit dihilangkan (yang sangat memalukan adalah peristiwa Santa Cruz).

Dengan ditariknya personil ABRI/militer selain perlu diisi/diganti personil Polri, (Polri di depan) ternyata terdapat beberapa Garda (satuan rakyat yang membantu militer, semacam tenaga bantuan operasional) yang perlu penanganan khusus.

Otonomi yang seluas-luasnya, Polri perlu memperstapkan diri, terutama sumda (manusia dan logistik).

Polda Timor Timur sebagai Polda yang masih baru (ex Polwil jadi Polda akhir tahun 1997) mempunyai banyak keterbatasan, dihadapkan kepada permasalahan yang menjadi perhatian dunia diperlukan kebijaksanaan yang "sepadan" dan "memadai" terutama terhadap sumda (personil dan logistik), baik dalam rangka seleksi/rekrutmen calon personil dari putra daerah, maupun "kebijaksanaan" terhadap personil yang bukan putra daerah.

KONSEPSI PENANGANAN

Penambahan jumlah personil dan sarana pendukung :

Jangka pendek :
Penambahan 2 SSK Brimob untuk ditempat-

kan di sektor timur dan sektor barat dengan tugas :

Mengisi Pos Bimmaspol di desa tertentu untuk mengagantikan posisi peran pos BTT.

Melakukan pengamanan pada rute perjalanan umum (RPU).

Pengamanan obyek vital.

Mencukupi sarana pendukung berupa alat/alsu :

Alkomlek, HT (sesuai persetujuan Kapolri pada medio tahun 1998)

Ranmor patroli (roda 4, roda 2 tril).

Ranmor pengawalan (Pam anti penghadangan).

Senpi standar ABRI bagi 1 SSK Brimob yang belum dilengkapi Senpi.

Rompi anti peluru.

Sarana Jihandak.

Perengkapan PHH/Dalmas untuk 13 SSK.

Jangka panjang :

Untuk menghadapi otonomi khusus Timor Timur disarankan untuk pengadaan personil Diktuk BA/TA diberikan prioritas kepada putra asli daerah Timor Timur.

Penanganan Garda-garda yang ditinggalkan oleh Kopassus disarankan :

Pembinaannya diserahkan kepada aparat Teritorial (Korem/Kodim).

Sebagian yang memenuhi persyaratan direkrut menjadi :

Satpam.

Wiraswasta.

Petani.

(setelah melalui pelatihan).

Secara konsisten dan konsekwen melanjutkan kebijaksanaan terhadap pembinaan personil yang bertugas di Timor Timor (selama ini sudah berjalan).